

ASN, Lurah/Pamong Tak Boleh Berpihak

ASN, Lurah/Pamong Tak Boleh Berpihak

PROGO TENGAH
n Berkelanjutan

saat ini, orang hidup semakin individualis,” jelasnya.

Sedangkan Ketua PMI DIY GBPH H Prabukusumo SPsi, menyebutkan musyawarah PMI Bantul 2024 sekaligus pemilihan Ketua PMI Bantul masa bakti 2024-2029 ini merupakan suatu agenda yang lebih penting. “Karena itu saya berharap kepengurusan PMI Bantul bisa terpilih orang-orang yang berjiwa pengabdian dan berkepribadian luhur, karena tugas di PMI itu fokus pada sosial kemasyarakatan,” ungkap Gusti Prabu.

Sementara Ketua PMI Bantul HM Wirmon Samawi SE MIB, menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran PMI Bantul yang telah mengabdikan diri di PMI Bantul. “Pengurus baru yang nanti diharapkan tetap guyub rukun,” papar Wirmon.

Dalam akhir Muskab tersebut dilakukan pemilihan ketua. Ada dua yang dicalonkan, yakni Agus Budi Raharjo dan Dwi Daryanto. Agus Budi Ra-

Ketua PMI Bantul periode 2024-2029 menggantikan Wirmon Samawi yang sudah menjabat tiga periode. **(Jdm)-d**

KONSULTASI PUBLIK I KLHS RDTR KULONPROGO TENGAH

Upaya Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan

KULONPROGO
(KR) - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulonprogo, Ir Gusdi Hartono MT menegaskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan analisis sistimatis, menyeluruh, partisipatif untuk memastikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan (PB) telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana dan/ atau Program (KRP) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Penyusunan KLHS harus berdasar regulasi dan pentahapan yang ada. Konsultasi Publik KLHS RDTR Kulonprogo Tengah upaya penjaringan isu PB. Sehingga partisipasi, masukan dan permasalahan isu PB dari peserta konsultasi publik sangat kita harapkan,” kata Gusdi Hartono saat membuka Konsultasi Publik I KLHS RDTR Kulonprogo Tengah di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUP-KP) Kulonprogo, belum lama ini.

Menurut Gusdi, yang tahu permasalahan di lingkungannya tentu peserta konsultasi publik, sehingga dalam kesempatan tersebut, peserta betul-betul diminta menyampaikan saran, kritik dan masukan sebagai bahan dalam penyusunan KLHS RDTR Kulonprogo Tengah.

Penyusun KLHS RDTR Kulonprogo Tengah dari CV Puri Sapta, Anton Rubiantoro memastikan tim penyusun tidak pasif tapi juga memantik warga dan

peserta konsultasi publik untuk menyampaikan usulan dan permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka masing-masing.

Deliniasi wilayah studi Penyusunan KLHS Kulonprogo Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Kulonprogo No 22/C/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulonprogo No 407/A/2021 tentang Deliniasi/Batas Wilayah Perencanaan RDTR Kulonprogo Tengah meliputi Kapanewon Nanggulun, Kokap, Pengasih dan Kapanewon Temon.

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulonprogo 2022-2026, empat wilayah studi tersebut termasuk rawan longsor, banjir, kekeringan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan, efidemi dan wabah, kegagalan teknologi dan multi ancaman.

Tim Ahli Validasi KLHS DLHK DIY, Dr Yuningtyas Setyawati MSi, C EIA menegaskan konteks KLHS dalam perencanaan tata ruang, sebagai instrumen untuk mengarusutamakan prinsip Pembangunan Berkelanjutan (PB).

“Pembangunan berkelanjutan, upaya sadar

dan terencana memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan,” ujarnya.

Sedangkan perencanaan tata ruang adalah penetapan struktur dan pola ruang. KLHS suatu cara untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan atau keberlanjutan serta media konsultasi dengan para *stakeholder* dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

KLHS harus diintegrasikan dengan berbagai kegiatan tim perencanaan. KLHS bisa membangun dan memperkuat kajian lingkungan hidup sebagai bagian proses perencanaan. “Dalam mekanisme konsultasi KLHS tak hanya melibatkan pemangku kepentingan tapi juga memperkuat keterlibatan mereka. KLHS memperkuat proses perencanaan melalui identifikasi masalah lingkungan hidup dan kendala pembangunan di wilayah studi,” katanya.

(Rul)-d



KR-Asrul Sani

Kepala DLH Kulonprogo, Ir Gusdi Hartono MT (dua kanan) saat membuka Konsultasi Publik I KLHS RDTR Kulonprogo Tengah.